

## **BAB 2**

### **GAMBARAN UMUM**

Gambaran umum berisi tentang informasi-informasi secara umum yang berkaitan dengan topik penelitian proses *Collaborative Governance* dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pemalang. Bab ini juga menguraikan mengenai pihak yang terlibat dalam proses *Collaborative Governance* dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pemalang, yaitu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang. Selain itu, dijelaskan mengenai gambaran umum fokus penelitian, yaitu mengenai kebijakan Kabupaten Layak Anak secara lebih detail.

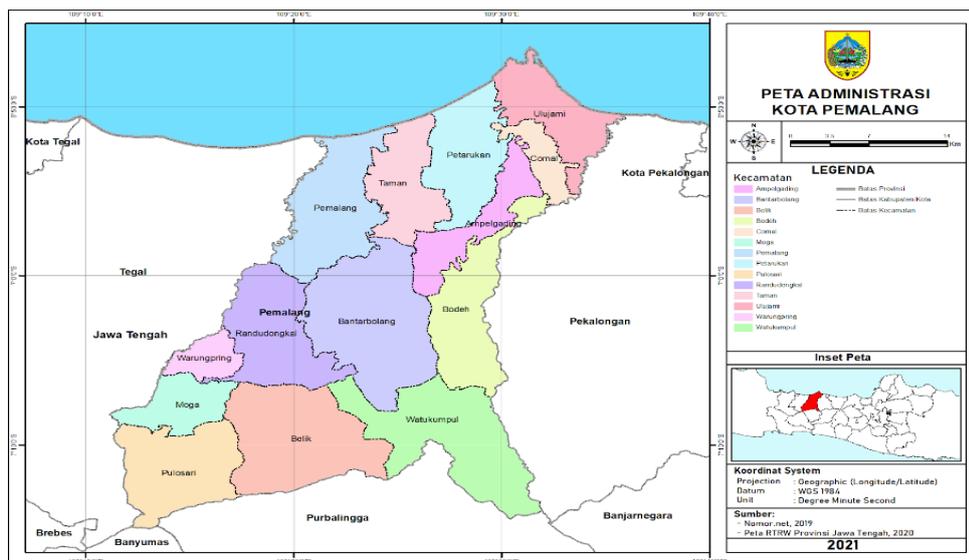
#### **2.1. Gambaran Umum Kabupaten Pemalang**

##### **2.1.1. Kondisi Geografi dan Administrasi Kabupaten Pemalang**

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Pemalang terletak pada  $109^{\circ} 11' 13.452''$  –  $109^{\circ} 35' 45.969''$  Bujur Timur (BT) dan  $6^{\circ} 46' 22.17''$  –  $7^{\circ} 14' 55.879''$  Lintang Selatan (LS) dengan luas wilayah 1.115,30 Km<sup>2</sup>. Daerah pantai di Utara berkisar antara 1-5 meter di atas permukaan laut; daerah tengah adalah dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6-15 meter di atas permukaan laut; dan daerah Selatan adalah dataran tinggi dan pengunungan yang subur dan berhawa sejuk dengan ketinggian 16-925 meter di atas permukaan laut.

Batas wilayah administrasi Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut:

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pemalang



Sumber: RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018 – 2038

Kabupaten Pemalang memiliki iklim tropis dengan dua musim, musim penghujan dan musim kemarau, yang berganti setiap enam bulan. Suhu rata-rata di daerah ini berkisar antara 24°C dan 31°C. Jumlah curah hujan di Kabupaten Pemalang berkisar antara 2.000 dan 6.700 mm per tahun dengan rata-rata 267 mm per tahun. Curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Januari hingga Februari, mencapai 593 mm dan 673 mm, dan curah hujan paling rendah terjadi pada bulan Agustus, mencapai hanya 60 mm. Pada tahun 2022, hampir sepanjang Kabupaten Pemalang diguyur hujan, dengan rata-rata 10 hari hujan setiap bulan dan curah hujan rata-rata 373,82 mm<sup>3</sup>.

Kabupaten Pemalang memiliki posisi yang strategis, baik dari sisi perdagangan maupun pemerintahan. Selain itu, menyimpan potensi sumber

daya alam dengan panorama keindahan alam yang memikat serta sumber daya manusia yang sangat besar menjadikan Kabupaten Pemalang sebagai sebuah potensi yang terpendam yang siap untuk digali. Topografi alamnya yang berupa dataran pantai, dataran rendah, dataran tinggi serta daerah pegunungan sehingga menjadikan tanah di Kabupaten Pemalang memiliki tanah yang subur dengan panorama yang asri dan indah.

Luas Kabupaten Pemalang adalah 1.115,3 km<sup>2</sup>, yang merupakan 3,43% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Geografisnya, Kabupaten Pemalang dikelilingi oleh satu laut dan tiga kabupaten lain. Kabupaten Pemalang terletak di sebelah utara laut Jawa, di sebelah timur Kabupaten Pekalongan, di sebelah selatan Kabupaten Purbalingga, dan di sebelah barat Kabupaten Tegal. Terdapat berbagai jenis topografi di Kabupaten Pemalang, termasuk desa di pesisir pantai 9%, desa di dataran rendah 46%, desa di dataran tinggi 16%, dan desa di pegunungan 29%. Berikut disajikan tabel keadaan geografi Kabupaten Pemalang tahun 2023:

Tabel 2.1 Ringkasan Keadaan Geografi Kabupaten Pemalang tahun 2023

<b>Kondisi Geografi Kabupaten Pemalang</b>	
Luas Wilayah	1.115,3 km <sup>2</sup>
Batas Utara	Laut Jawa
Batas Timur	Kabupaten Pekalongan
Batas Selatan	Kabupaten Purbalingga
Batas Barat	Kabupaten Tegal
Desa di pesisir pantai	19 desa (9%)
Desa bukan di pesisir pantai :	
Desa di dataran rendah	103 desa (46%)
Desa di dataran tinggi	35 desa (16%)
Desa di pegunungan	66 desa (29%)

Sumber: Statistik Kabupaten Pemalang (2023)

Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan dan 222 desa/kelurahan serta 1 (satu) desa persiapan di wilayah Kecamatan Belik. Kecamatan yang memiliki wilayah administratif paling luas adalah Kecamatan Bantarbolang, , yaitu mencapai 139,19 Km<sup>2</sup> (12,48%), sedangkan yang paling sempit adalah Kecamatan Warungpring, yaitu seluas 26,31 Km<sup>2</sup> (2,36%). Secara rinci pembagian luas wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Luas Wilayah Kabupaten Pemalang

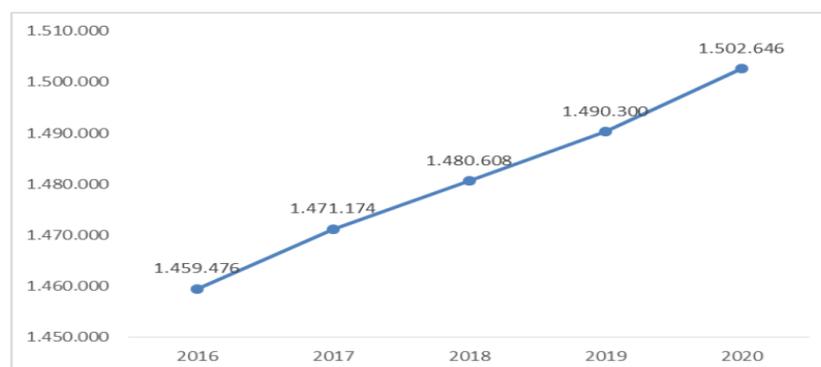
No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase
1.	Moga	10	41.40	3.71
2.	Warungpring	6	26.31	2.36
3.	Pulosari	12	87.52	7.85
4.	Belik	12	124.54	11.17
5.	Watukumpul	15	129.02	11.57
6.	Bodeh	19	85.98	7.71
7.	Bantarbolang	17	139.19	12.48
8.	Randudongkal	18	90.32	8.10
9.	Pemalang	20	101.93	9.14
10.	Taman	21	67.41	6.04
11.	Petarukan	20	81.29	7.29
12.	Ampelgading	16	53.30	4.78
13.	Comal	18	26.54	2.38
14.	Ulujami	18	60.55	5.43
	<b>Jumlah</b>	<b>222</b>	<b>1,115.30</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Kabupaten Pemalang dalam Angka (2021)

### 2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Pemalang

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2020 sebesar 1.502.646 jiwa, yang terdiri dari 760.798 jiwa (50,90%) penduduk laki-laki dan 739.956 jiwa (49,10%) penduduk perempuan.

Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pemalang  
Tahun 2016-2020



Sumber: Disdukcatpil Kabupaten Pemalang (2021)

Kepadatan penduduk tahun 2020 sebesar 1.347 jiwa/km<sup>2</sup> dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.336 jiwa/km<sup>2</sup>, secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2020

No	Variabel	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk (jiwa)	1.459.476	1.471.174	1.480.608	1.490.300	1.502.646
2.	Laki-laki (jiwa)	744.979	750.772	754.212	758.287	764.805
3.	Perempuan (jiwa)	714.497	720.402	726.396	732.013	737.841
4.	Rasio Jenis kelamin (%)	104,27	104,22	103,8	103,6	103,7
5.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	1.309	1.319	1327,53	1.336	1.347

Sumber: Statistik Kabupaten Pemalang (2023)

Persebaran penduduk di Kabupaten Pemalang tidak merata, , yaitu terdapat 3 (tiga) kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak terletak di daerah pusat kota dan daerah penyangga, yaitu Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Petarukan. Secara rinci jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang per kecamatan 2016- 2020

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Moga	69.961	71.664	72.648	74.581	74.922
	Laki-laki	35.538	36.422	36.962	37.969	38.129
	Perempuan	34.423	35.242	35.686	36.612	36.793
2.	Pulosari	54.417	58.032	61.265	61.064	61.852
	Laki-laki	27.732	29.617	31.091	31.063	31.411
	Perempuan	26.685	28.415	30.174	30.001	30.441
3.	Belik	111.571	117.460	118.274	118.688	120.130
	Laki-laki	57.261	60.196	60.610	60.829	61.568
	Perempuan	54.310	57.264	57.664	57.859	58.562
4.	Watukumpul	76.400	79.598	75.820	74.743	75.457
	Laki-laki	39.258	41.076	38.940	38.628	39.068
	Perempuan	37.142	38.522	36.880	36.115	36.389
5.	Bodeh	62.383	61.728	62.928	63.237	63.470
	Laki-laki	31.830	31.535	32.090	32.244	32.345
	Perempuan	30.553	30.193	30.838	30.993	31.125
6.	Bantarbolang	86.993	88.021	86.609	85.109	86.086
	Laki-laki	44.303	44.882	44.002	43.215	43.700
	Perempuan	42.690	43.139	42.607	41.894	42.386
7.	Randudongkal	110.094	109.194	112.900	113.238	113.975
	Laki-laki	56.139	55.713	57.377	57.337	57.746
	Perempuan	53.955	53.481	55.523	55.901	56.229
8.	Pemalang	202.355	198.640	202.944	206.100	208.127
	Laki-laki	102.975	101.024	103.284	104.738	105.843
	Perempuan	99.380	97.616	99.660	101.362	102.284
9.	Taman	188.395	188.767	186.823	188.647	190.606
	Laki-laki	96.146	96.209	95.155	96.010	97.024
	Perempuan	92.249	92.558	91.668	92.637	93.582
10.	Petarukan	161.378	164.250	171.127	172.986	174.451
	Laki-laki	82.436	83.769	87.180	87.939	88.757
	Perempuan	78.942	80.481	83.947	85.047	85.694
11.	Ampelgading	77.182	76.224	75.703	76.072	76.415
	Laki-laki	39.150	38.591	38.167	38.272	38.393
	Perempuan	38.032	37.633	37.536	37.800	38.022
12.	Comal	97.057	94.724	94.996	96.249	96.358
	Laki-laki	49.421	48.188	48.191	48.652	48.792
	Perempuan	47.636	46.536	46.805	47.597	47.566
13.	Ulujami	117.146	118.602	114.499	115.168	116.151
	Laki-laki	60.110	60.829	58.616	58.710	59.258
	Perempuan	57.036	57.773	55.883	56.458	56.893
14.	Warungpring	44.144	44.270	44.072	44.418	44.646
	Laki-laki	22.680	22.721	22.547	22.681	22.771
	Perempuan	21.464	21.549	21.525	21.737	21.875
	<b>Jumlah</b>	<b>1.459.476</b>	<b>1.471.174</b>	<b>1.480.608</b>	<b>1.490.300</b>	<b>1.502.646</b>

Sumber: Disdukcatpil Kabupaten Pemalang (2021)

Untuk kepadatan penduduk di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020, paling besar berada di Kecamatan Comal yang mencapai 3.631 jiwa/km<sup>2</sup> dan

paling kecil berada di Kecamatan Watukumpul yang mencapai 585 jiwa/km<sup>2</sup>, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk Kabupaten Pemalang Per Kecamatan Tahun 2016-2020 (jiwa/km<sup>2</sup>)

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Moga	1.689	1.731	1.754	1.801	1.810
2.	Pulosari	622	663	700	698	707
3.	Belik	892	943	950	953	965
4.	Watukumpul	592	617	588	579	585
5.	Bodeh	726	718	732	735	738
6.	Bantarbolang	625	623	622	611	618
7.	Randudongkal	1.219	1.209	1.250	1.254	1.262
8.	Pemalang	1.985	1.949	1.991	2.022	2.042
9.	Taman	2.795	2.800	2.771	2.799	2.828
10.	Petarukan	1.985	2.021	2.105	2.128	2.146
11.	Ampelgading	1.448	1.430	1.420	1.427	1.434
12.	Comal	3.657	3.569	3.579	3.627	3.631
13.	Ulujami	1.935	1.959	1.891	1.902	1.918
14.	Warungpring	1.678	1.683	1.675	1.688	1.697
	<b>Jumlah</b>	<b>1.309</b>	<b>1.319</b>	<b>1327,53</b>	<b>1.336</b>	<b>1.347</b>

Sumber : Disdukcatpil Kabupaten Pemalang (2021)

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2020 terdapat sebesar 23,75% berusia 0-14 tahun, 69,56% berusia produktif (15-64 tahun) dan 6,69% berusia 65 tahun ke atas sehingga berdasarkan angka mutlakanya diperoleh angka ketergantungan penduduk Pemalang tahun 2020 sebesar 43,75%, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43 orang penduduk usia tidak produktif. Secara rinci jumlah penduduk menurut kelompok umur Kabupaten Pemalang tahun 2020 dapat dilihat pada table 2.6 berikut:

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang Menurut Kelompok Umur Tahun 2016-2020

Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
0 – 4	103.486	105.712	104.117	115.208	109.904
5 – 9	118.228	120.924	116.585	126.777	126.644
10 – 14	119.686	121.224	109.222	119.682	120.286
15 – 19	132.677	132.827	111.786	118.735	106.445
20 – 24	141.723	140.278	132.031	128.351	132.161
25 – 29	132.237	135.069	134.220	130.957	130.349
30 – 34	131.798	129.404	123.586	116.019	119.894
35 – 39	116.622	120.531	127.915	122.869	123.050
40 – 44	101.880	102.634	106.880	106.057	109.957
45 – 49	89.475	92.781	98.538	94.550	95.014
50 – 54	81.885	82.580	87.915	86.669	89.275
55 – 59	67.584	68.428	76.405	76.032	77.034
60 – 64	49.923	49.267	56.911	57.867	62.130
65 – 69	32.700	32.671	41.036	42.266	45.206
70 – 75	19.714	18.513	23.959	23.640	26.953
75+	19.856	18.331	29.502	24.621	28.344
<b>Jumlah</b>	<b>1.459.476</b>	<b>1.471.174</b>	<b>1.480.608</b>	<b>1.490.300</b>	<b>1.502.646</b>

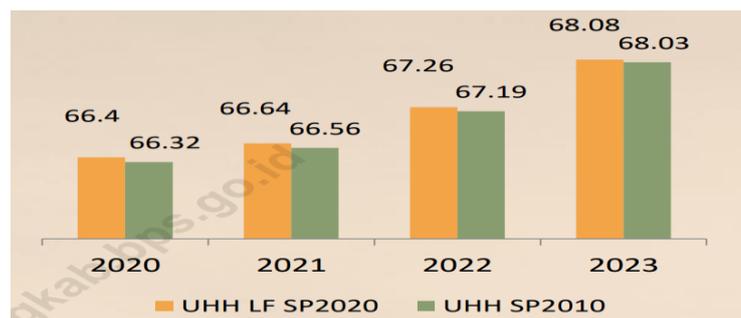
Sumber: Disdukcatpil Kabupaten Pemalang (2021)

### 2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang

IPM dapat menjelaskan bagaimana penduduk mengakses hasil pembangunan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Dua nilai Umur Harapan Hidup (UHH), kondisi berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020), digunakan untuk menghitung IPM tahun 2023. Dari tahun 2020 hingga 2023, pembangunan manusia Kabupaten Pemalang terus mengalami kemajuan. Hasil UHH LF SP2020 menunjukkan IPM Kabupaten Pemalang sebesar 68,08, sedangkan hasil UHH SP2010 menunjukkan IPM Kabupaten Pemalang sebesar 68,03. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun

sebelumnya. Berikut disajikan gambar 2.3 grafik IPM Kabupaten Pematang tahun 2020 – 2023:

Gambar 2.3 Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pematang 2020- 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pematang (2023)

Dimensi hidup layak (IPM) terdiri dari dimensi kesehatan, seperti Umur Harapan Hidup (UHH), dimensi pendidikan, seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Hasil UHH Kabupaten Pematang tahun 2022 sebesar 73,85 tahun berdasarkan hasil SP2010, sedangkan hasil LF SP2020 sebesar 73,98 tahun. Angka ini meningkat dibandingkan dengan hasil tahun 2022 sebesar 73,65 tahun berdasarkan SP2010 dan 73,82 tahun berdasarkan LF SP2020. Pendidikan dan layak hidup juga meningkat. Pengeluaran per kapita disesuaikan tahun 2023 sebesar 9,59 juta USD per orang, meningkat 6,59% dari tahun 2022. Rata-rata lama sekolah tahun 2023 adalah 6,55 tahun. Berikut disajikan tabel IPM Kabupaten Pematang:

Tabel 2.7 Ringkasan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten

Pemalang tahun 2022 – 2023

<b>Komponen IPM</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Umur Harapan Hidup (SP2010) (tahun)	73,65	73,85
Umur Harapan Hidup (LF SP2020) (tahun)	73.82	73,98
Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,50	6,55
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,98	12,01
Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu/Rp/orang/tahun)	8.994	9.587
IPM (UHH SP2010)	67,19	68,03
IPM (UHH LF SP2020)	67,26	68,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang (2023).

## 2.2. Gambaran Umum Kebijakan Kabupaten Layak Anak

### 2.2.1. Kabupaten Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan sebuah kerangka peningkatan pembangunan wilayah dengan menggabungkan antara komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, serta merencanakan kebijakan, rencana, dan kegiatan yang bermaksud untuk mewujudkan hak-hak anak secara komprehensif dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia, yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (*world fit for children*).

Terdapat 7 (tujuh) prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap kabupaten/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak di antaranya adalah adanya dukungan peraturan legal yang mengatur pemenuhan hak anak, adanya dukungan dana yang memadai untuk pemenuhan hak anak, tersedianya tenaga yang sensitif anak, adanya lembaga masyarakat yang mendorong pemenuhan hak anak, adanya forum anak dan adanya dukungan sektor swasta untuk pemenuhan hak anak.

### **2.2.2. Strategi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak**

Strategi pemenuhan hak anak (PUHA) digunakan oleh KLA yang berarti mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam semua tahapan penyusunan, seperti kebijakan, program, dan kegiatan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan setiap tingkat wilayah, seperti nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengarusutamaan pemenuhan hak anak (PUHA) adalah upaya untuk mengintegrasikan hak dasar anak ke dalam perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi dengan prinsip untuk kepentingan anak.
- 2) Penguatan kelembagaan, yaitu untuk meningkatkan kelembagaan PP dan PA, LSM, dan Dunia Usaha di semua wilayah administrasi pemerintahan untuk proaktif dalam memenuhi hak anak.

- 3) Membangun jaringan berarti bekerja sama dan berkomitmen untuk operasionalisasi kebijakan KLA dengan lembaga lain yang bekerja di bidang perencanaan dan pengembangan kota, tata ruang, dan gugus tugas yang relevan dan penting untuk pembangunan KLA.
- 4) Promosi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (PKIE) adalah upaya untuk memanfaatkan media dalam melembagakan dan membudayakan KLA untuk mendorong komunikasi dan pemahaman bersama, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi kepada masyarakat.
- 5) KLA diklasifikasikan menjadi pratama, madya, nindya, utama, dan KLA utama. Upaya untuk memberikan sertifikat capaian dan penghargaan untuk prestasi dalam mengembagkan KLA dikenal sebagai sertifikasi dan apresiasi.

### **2.2.3. Tujuan Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak**

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Peraturan Presiden Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan pada Bahan Advokasi Kebijakan KLA tahun 2016 disebutkan bahwa tujuan utama Kebijakan KLA adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan KLA meliputi:

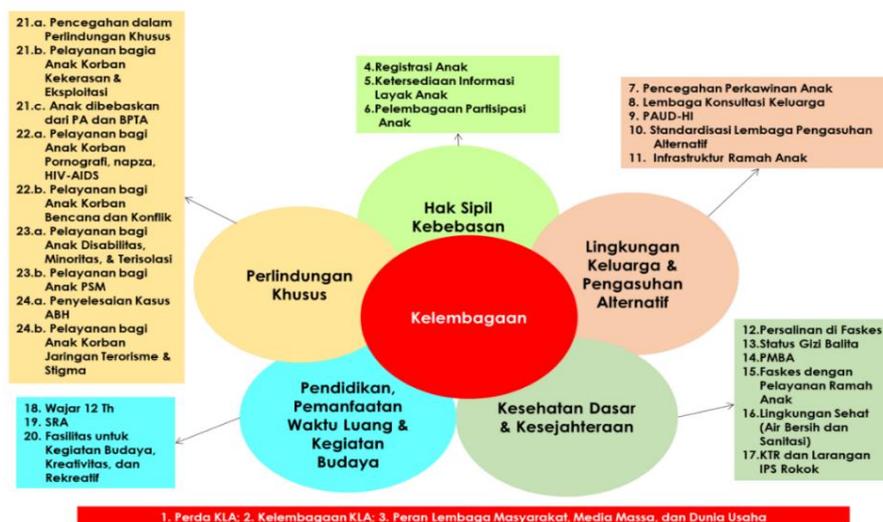
- 1) Membangun komitmen pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, untuk mendorong semua pihak yang terlibat dalam pembangunan, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun swasta, untuk mencapai kepentingan terbaik anak.

- 2) Untuk memenuhi hak-hak anak, mengintegrasikan semua sumber daya manusia, dana, sarana, prasarana, teknologi, dan sumber daya pemerintah dan swasta yang tersedia.
- 3) Untuk menerapkan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak, strategi dan perencanaan pembangunan pemerintah daerah harus disusun secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.
- 4) Untuk memenuhi hak anak melalui berbagai program pembangunan, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, organisasi masyarakat, organisasi anak, organisasi profesi, dan organisasi swasta harus meningkatkan kapasitas mereka.

#### **2.2.4 Indikator Umum Kabupaten Layak Anak**

Dalam peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu secara ideal, kabupaten/kota layak anak (KLA) harus memenuhi semua kriteria yang ditetapkan oleh Konveksi Hak Anak (KHA). Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak, kriteria ini disusun berdasarkan kekuatan kelembagaan dan lima (lima) klaster hak anak: (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, rekreasi, dan kegiatan budaya; dan (5) Perlindungan khusus terhadap hak anak.

Gambar 2.4 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)



Sumber: Renstra Kedeputian Pemenuhan Hak Anak, KemenPPPA 2020-2024

Dalam Permen PPPA Nomor 12 tahun 2011 dijelaskan bahwa indikator Kota Layak Anak meliputi: penguatan kelembagaan serta pemenuhan kebutuhan berdasarkan klaster hak anak. Dalam pelaksanaannya program Kota Layak Anak harus sesuai dengan lima Klaster yang terdapat dalam Hak Anak (sesuai dengan Konvensi Hak Anak), salah satunya klaster perlindungan khusus. Perlindungan Khusus. Klaster ini meliputi indikator presentasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan memperoleh layanan; presentasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif (*Restorative Justice*); mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.

## **2.3. Gambaran Umum Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

### **2.3.1. Visi dan Misi Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang**

Visi organisasi dibentuk agar seluruh staf Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat menerapkannya untuk memenuhi tugas dan fungsinya. Dengan demikian, diharapkan bahwa Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan pemerintahan yang baik. Perkembangan yang terus menerus dan perubahan ke arah yang lebih baik berbagai potensi dan tantangan masa mendatang dengan mempertimbangkan realita terkini dan prospek yang hendak dicapai dimasa depan. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang memiliki visi sebagai berikut **“Layanan Prima Demi Kepentingan Terbaik Masyarakat”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, memiliki Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang misi:

- 1) Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan.
- 2) Memperkuat keterpaduan dan sinergitas antar unit layanan.
- 3) Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan.
- 4) Memperluas jejaring penanganan sampai ke desa/kelurahan.
- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana.

### **2.3.2. Tugas dan Fungsi Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang**

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, disebutkan bahwa Dinsos KBPP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinsos KBPP juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### 2.3.3 Produk Layanan Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang

Dalam melaksanakan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang menyelenggarakan beberapa jenis layanan sesuai dengan yang tercantum dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), sebagai berikut.

Gambar 2. 5 Produk Layanan di Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang

 <p><b>Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan...</b> Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Sosial, Pengendalian Pendudu... Data PD terverifikasi di aplikasi SIMPD</p>	 <p><b>Layanan rujukan rehabilitasi sosial ke Panti Sosial</b> Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Sosial, Pengendalian Pendudu... Surat Rekomendasi Rujukan dari Dinas Sosial KBPP ke LKS</p>
 <p><b>Layanan Respon Kasus</b> Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Sosial, Pengendalian Pendudu... Pendampingan, Konferensi Kasus</p>	 <p><b>Pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan...</b> Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Sosial, Pengendalian Pendudu... 1. Layanan Pengaduan di PPT Jayandu Widuri a. Hasil Screening Kasus (KTPA / Non KTPA) b. Hasil Konseling/ Mediasi (Surat Pernyataan, Berita Acara, Rekomendasi c....</p>
 <p><b>Pelayanan penanganan korban bencana</b> Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Sosial, Pengendalian Pendudu... Bantuan Berupa Logistik untuk Korban Bencana</p>	 <p><b>Pengajuan alat bantu Mobilitas</b> Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Sosial, Pengendalian Pendudu... Bantuan Kursi Roda bagi Penyandang Disabilitas</p>
 <p><b>Penanganan PGOT</b> Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Sosial, Pengendalian Pendudu... Penanganan PGOT</p>	 <p><b>Pengangkatan Anak</b> Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Sosial, Pengendalian Pendudu... Izin Pengangkatan Anak</p>
 <p><b>Keterangan ruta terdaftar pada data terpadu...</b> Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Sosial, Pengendalian Pendudu... Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT PPFM-OTM)</p>	 <p><b>Pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial</b> Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Sosial, Pengendalian Pendudu... Surat Tanda Daftar Pendirian LKS</p>

Sumber: <https://dinsoskbpp.pemalangkab.go.id/> (2023)

Gambar 2.6 Kantor PPT Jayandu Widuri Dinsos KBPP Kabupaten  
Pemalang



Sumber: <https://dinsoskbpp.pemalangkab.go.id/> (2023)

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang meliputi bidang-bidang yang diklasifikasikan sesuai dengan tugasnya. Adapun produk layanan yang diselenggarakan oleh bidang PPPA dalam naungan Dinsos KBPP antara lain:

- a. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Produk layanan pada bidang ini antara lain: Layanan Pengaduan PPT Jayandu Widuri menghasilkan; Hasil *Screening* Kasus (KTPA/Non KTPA); Hasil Konseling/Mediasi (Surat Pernyataan, Berita Acara, Rekomendasi); Rujukan ke Unit lain; Layanan Pendampingan.
- b. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jayandu Widuri
  - a. Layanan pengaduan meliputi penerimaan laporan, konsultasi, konseling, penjangkauan/home visit, pendampingan pada roses visum, layanan kesehatan, pemeriksaan saksi korban di kepolisian, pemeriksaan saksi/korban di pengadilan, mediasi maupun pengelolaan

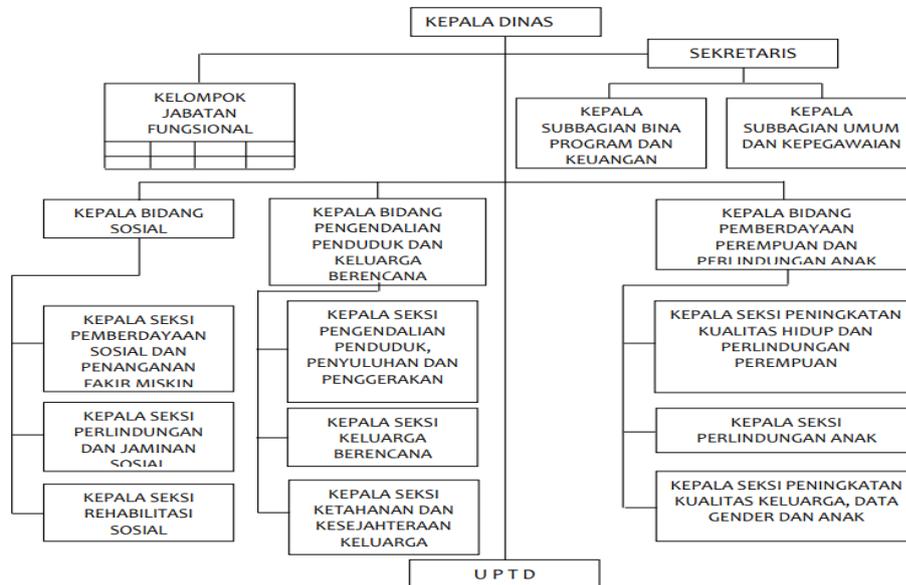
kasus yang dilakukan unit pengaduan PPT Jayandu Widuri di Dinsoskbpp Kab. Pematang Jaya.

- b. Layanan Rehabilitasi Sosial oleh pekerja sosial dan psikolog pada Dinsoskbpp Kab. Pematang Jaya dan RSUD dr. M. Ashari Pematang Jaya.
- c. Layanan Bimbingan Rohani, Layanan Penegakan Hukum oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan Layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh pendamping hukum maupun advokat.
- d. Layanan Pemulangan Korban oleh Dinsoskbpp Kab. Pematang Jaya maupun Disnaker Kab. Pematang Jaya serta Layanan Reintegrasi Sosial oleh pekerja sosial pada Dinsoskbpp Kab. Pematang Jaya.

#### **2.3.4. Struktur Organisasi Dinsos KBPP Kabupaten Pematang Jaya**

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pematang Jaya Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya dinyatakan bahwa susunan organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut.

Gambar 2.7 Struktur Organisasi Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang



Sumber: Rencana Strategis Dinsos KBPP Kab.Pemalang 2021 – 2026.

### 2.3.5 Sumber Daya Manusia di Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang tahun 2021 – 2026 diuraikan SDM yang berperan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinsos KBPP antara lain sebagai berikut:

#### 1) Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Rekapitulasi data Pegawai berikut menggambarkan jumlah pegawai menurut golongan, jenis kelamin, status kepegawaian pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Tabel 2.8 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinsos  
KBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2021

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JENIS KELAMIN		
		L	P	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda – IV/c	1	-	1
2.	Pembina Tk. – IV/b	-	-	-
3.	Pembina – IV/a	4	2	6
4.	Penata Tk. I – III/d	1	8	9
5.	Penata – III/c	1	4	5
6.	Penata Muda Tk. I – III/b	4	1	5
7.	Penata Muda – III/a	2	2	4
8.	Pengatur Tk. I – II/d	-	-	-
9.	Pengatur – II/c	2	-	2
10.	Pengatur Muda Tk.I – II/b	1	-	1
11.	Pengatur Muda – II/a	-	-	-
12.	Juru Tk. I – I/d	-	-	-
13.	Juru – I/c	1	-	1
14.	Juru Muda TK. I – I/b	-	-	-
15.	Juru Muda – I/a	-	-	-
	Jumla	17	17	34

Sumber: Renstra Dinsos KBPP Kab. Pemalang tahun 2021 – 2026.

Tabel 2.9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal Dinsos KBPP  
Kabupaten Pemalang Tahun 2021

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		
		L	P	JUMLAH
1.	Strata 2	5	5	10
2.	Strata 1	3	7	10
3.	Sarjana Muda	-	3	3
4.	Diploma 3	3	1	4
5.	Diploma 2	-	-	-
6.	Diploma 1	-	-	-
7.	SLTA	5	1	6
8.	SLTP			-
9.	SD	1	-	1
	Jumlah	17	17	34

Sumber: Renstra Dinsos KBPP Kab. Pemalang tahun 2021 – 2026.

## 2) Sarana dan Prasarana (Asset)

Tabel 2.10 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinsos  
KBPP Tahun 2021

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Rapat	1	Lt.II
2	Pesawat Telephone	6	2 unit yang masih digunakan: 1. Sekretariat 2. R.Kepala Dinas
3	Facsimile	1	Sekretariat
4	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	15	
5	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	114	intern dan Penyuluh KB
6	Komputer/PC	31	3 Rusak Berat
7	Printer	77	23 unit Rusak Berat
8	LCD/Proyektor Attachment	44	intern, TSKS, Penyuluh KB
9	Note Book	10	1 unit Rusak Berat
10	Laptop	49	7 unit Rusak Berat
11	Lemari Besi	6	
12	Filling Cabinet	20	
13	AC Split	20	3 unit sedang diusulkan penghapusan karena Rusak Berat
14	AC unit	10	

Sumber: Dinsos KBPP Kabupaten Pematang (2021)

### 2.3.6 Prestasi Dinsos KBPP Kabupaten Pematang

Berdasarkan publikasi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 yang dapat diakses melalui *website* Pemerintah Kabupaten Pematang, disebutkan beberapa penghargaan yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pematang berkaitan dengan DinsosKBPP, sebagai berikut:

- 1) Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak peringkat madya Tahun 2022 dan predikat nindya pada tahun 2023.

- 2) Pemalang juga berhasil meraih penghargaan kepada pemimpin daerah yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis sistem informasi monitoring evaluasi dan pelaporan (SIMEP) perlindungan anak.
- 3) Dalam bidang inovasi daerah kabupaten ini juga mendapat tiga penghargaan kepada inovasi pelayanan publik terbaik tahun 2022, salah satunya aplikasi gelang anting (Gerakan penanggulangan anak stunting) berbasis IT ([www.gelanganting.com](http://www.gelanganting.com)) merupakan pemantauan status gizi balita secara mandiri.